

Pemekaran Kabupaten Adonara – Nusa Tenggara Timur : Studi Tentang Gerakan Sosial Politik Masyarakat Daerah

Erick Evodius Ama Kia*

ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi diperkenalkan pada tahun 1999 melalui Undang - Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang – Undang No.25 Tahun.

Dengan munculnya perumusan desentralisasi oleh Pemerintah Pusat, maka muncul pula fenomena pemekaran di berbagai daerah.

Gerakan sosial tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses perubahan, termasuk dalam proses perubahan dari sentralisasi kearah desentralisasi di Indonesia.

Melihat dari deskriptif diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melihat gerakan sosial yang terjadi dalam sebuah proses desentralisasi, khususnya gerakan sosial masyarakat Adonara –Nusa Tenggara Timur dalam proses pemekaran kabupaten Adonara.

Usaha pemekaran Adonara menjadi kabupaten memang berawal dari masyarakat, karena animo masyarakat yang begitu besar.

Fokus utama studi ini adalah untuk memahami dan menjelaskan proses pembentukan gerakan serta pengaruhnya dalam usaha pemekaran kabupaten.

Penelitian ini juga akan melihat persoalan keikut sertaan masyarakat lokal Adonara yang ikut berpartisipasi aktif dalam proses pemekaran tersebut.

Penelitian ini sendiri akan menyorot sejauh mana aktor – aktor dari gerakan pemekaran tersebut menyiapkan Adonara untuk dapat layak menjadi kabupaten.

Kata kunci : Gerakan Sosial, Pemekaran Adonara

Abstract

Decentralization policy introduced in 1999 through Law Number 22 and Law Number 25 of 1999. The emerging of decentralization formulation by Central Government, then also emerge outspread phenomenon in various region. Social movement inseparable from a changes process, included in changes process from centralization into decentralization in Indonesia. Seen from above descriptive, then the writer interested to known and see that social movement happened in decentralization process, particularly social community movement of Adonara – East Nusa Tenggara in outspread process of Adonara Regency.

The efforts of Adonara outspread become a regency certainly begin from the community, because the people interest that so much.

The main focus of this study are to understanding and explain the process of movement formation as well as the effect on regency outspread effort

This research self will highlight how far the actors of that outspread movement preparing Adonara appropriate to be regency.

Keywords : Social Movement, Adonara Outspread

* Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

PENDAHULUAN

Dalam perjalanannya sejarah politik Indonesia diwarnai dengan berbagai ketegangan antara pusat dengan daerah. Namun pada dasarnya, tuntutan untuk merdeka tidak pernah menjadi target utama dari pergerakan daerah. Gerakan PRRI Permesta di Sulawesi Selatan misalnya, merupakan pemberontakan setengah hati yang menuntut merdeka sebagai bagian dari negosiasi politik dengan pusat. Sementara gerakan Aceh untuk merdeka di masa pemerintahan Soekarno digambarkan sebagai 'pemberontakan kaum republik' yaitu pemberontakan oleh para pendiri Republik yang kecewa terhadap Republik yang didirikannya. Pemberontakan daerah yang terjadi selama pemerintahan Orde Lama tersebut dipicu oleh ketidakadilan pemerintah pusat dalam memperlakukan daerah secara ekonomi politik dan kultural. Pemberontakan daerah pada prinsipnya adalah politik untuk menuntut perhatian.

Pada masa Orde Baru, kekecewaan daerah terhadap pusat sebenarnya terus berlanjut, tetapi tidak lagi bisa diekspresikan secara terbuka karena semua ruang publik ditutup dengan cara otoriter. Pada periode akhir 1990an sampai awal 2000an, Indonesia kembali dihadapkan pada fenomena keinginan beberapa daerah untuk merdeka. Ini berarti kekecewaan lama daerah terhadap ketidakadilan ekonomi, politik, dan kultural yang terjadi di era Orde Lama ternyata tidak dijawab secara serius oleh 30 tahun pemerintahan Orde Baru. Pemerintah pasca Orde Baru menyelesaikan tuntutan ini dengan memberikan pengakuan politik dan kultural serta alokasi fiskal yang lebih besar kepada daerah – daerah yang memberontak.

Pemerintahan pasca Soeharto yang tampil dibawah tekanan demokratisasi dan dilanda kelangkaan sumberdaya ekonomi telah benar – benar tidak bisa memanfaatkan sumber – sumber kekuasaan Orde Baru tersebut secara leluasa.

Kebebasan dan keterbukaan politik yang terjadi pasca Orde Baru membawa konsekuensi logis pada pemerintahan untuk segera mengubah diri. Segala macam kebijakan dan regulasi yang berbau Orde Baru yang sentralisasi diubah sedemikian besarnya menjadi sangat terdesentralisasi.

Kebijakan desentralisasi diperkenalkan pada tahun 1999 melalui Undang - Undang No.22

Tahun 1999 ; tentang pemerintahan daerah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, dan Undang – Undang No.25 Tahun 1999 ; Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua undang – undang ini lahir untuk merespon dua kondisi sosial politik yaitu merebaknya tuntutan daerah untuk memperoleh otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi dan merdeka.

Dua Undang - Undang tersebut lahir dengan dua misi utama, yakni *pertama* untuk memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi politik yang tinggi melalui desentralisasi politik dari pusat kepada daerah dan memberikan kesempatan dan kepuasan politik kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk menikmati *symbol – symbol* utama demokrasi local (misalnya pemilihan kepala daerah). *Kedua* untuk memuaskan daerah – daerah yang kaya akan sumberdaya alam yang 'memberontak' dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumberdaya alam yang ada di daerah masing – masing.

Bangsa Indonesia menaruh harapan yang besar terhadap keberhasilan format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam memperkuat integrasi nasional dan semangat kebangsaan.

Gerakan sosial tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses perubahan, termasuk dalam proses perubahan dari sentralisasi kearah desentralisasi di Indonesia. Gerakan sosial atau gerakan massa, atau gerakan informal, merupakan sebuah fenomena penting dalam sejarah pertumbuhan dan kemajuan Bangsa – Bangsa. Hampir semua peristiwa besar dan mengubah sebuah tatanan, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial budaya, seringkali bermula dan mendapat momentum melalui sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial itu dalam perspektif politik secara populer juga sering disebut *people power*.

Melihat dari deskriptif diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melihat gerakan sosial yang terjadi dalam sebuah proses desentralisasi, khususnya gerakan sosial masyarakat Adonara –Nusa Tenggara Timur dalam proses pemekaran kabupaten Adonara.

Issue pemekaran Adonara menjadi kabupaten yang berkembang pada tahun 1960'an, yang perkembangannya lebih karena

faktor kekesalan dari masyarakat Adonara, yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah di kabupaten. Masalah yang paling dirasakan pada waktu itu adalah persoalan transportasi yang sangat minim, baik transportasi antar desa dalam pulau maupun transportasi dari Adonara ke ibukota kabupatennya yaitu Larantuka. Transportasi yang dibutuhkan untuk ke Larantuka adalah transportasi laut.

Fokus utama studi ini adalah untuk memahami dan menjelaskan proses pembentukan gerakan serta pengaruhnya dalam usaha pemekaran kabupaten, khususnya pembentukan gerakan sosial masyarakat Adonara – Nusa Tenggara Timur dalam usaha pemekaran kabupaten Adonara.

Penelitian ini juga akan melihat persoalan keikutsertaan masyarakat lokal Adonara yang ikut berpartisipasi aktif dalam proses pemekaran tersebut. Di antaranya para elite lokal Adonara serta kaum akademisi yang secara gencar mensosialisasikan kepada masyarakat Adonara tentang pentingnya Adonara dimekarkan menjadi sebuah kabupaten.

Penelitian ini sendiri akan menyorot sejauh mana aktor – aktor dari gerakan pemekaran tersebut menyiapkan Adonara untuk dapat layak menjadi kabupaten. Serta sejauh mana aktor – aktor tersebut merangkul masyarakat Adonara untuk terlibat dalam usaha pemekarannya. Kenyataan yang dapat terlihat bahwa adanya peningkatan aktifitas masyarakat dalam usaha pemekaran dengan sering melakukan forum diskusi serta usaha sosialisasi yang dilakukan kaum akademisi atau aktor – aktor gerakan kepada masyarakat adonara.

Issue pemekaran yang telah lama muncul dan menjadi pembicaraan di kalangan elite lokal Adonara, baru mendapat perhatian dalam kurung waktu empat tahun terakhir dan menjadi pembicaraan bukan hanya di kalangan elite saja, namun juga telah menyita perhatian masyarakat lokal Adonara secara keseluruhan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini mempunyai tujuan yakni :

1. Melihat gerakan sosial yang muncul di Adonara, dalam usaha memekarkan diri menjadi Kabupaten

2. Melihat proses sosialisasi yang dilakukan Gerakan Pemekaran kepada masyarakat lokal
3. Melihat respon masyarakat Adonara menanggapi issue pemekaran Kabupaten Adonara
4. Melihat hambatan dan tantangan yang muncul dalam usaha Pemekaran serta perencanaan pembangunannya
5. Melihat peran Gerakan Pemekaran dan pandangannya tentang masa depan pembangunan Adonara

KAJIAN TEORITIK

Gerakan Sosial

Gerakan sosial secara sosiologis diklasifikasi sebagai perilaku atau aksi kolektif, dengan orientasi konflikual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor – aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk – bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.

Maka dari itu, akan dibahas terlebih dahulu tentang perilaku kolektif.

Perilaku kolektif (Macionis, 1989:528) adalah tindakan, pemikiran, dan perasaan-perasaan (emotions) yang meliputi sejumlah besar orang dan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Walaupun biasanya dampak yang muncul akan merugikan bagi pihak lain, namun perilaku kolektif bisa saja perilaku yang memiliki tujuan baik.

Menurut Di Renzo(1990) Gerakan Sosial (Soeyono, 2005:3) adalah perilaku dari sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu, untuk menghadirkan suatu kehidupan yang lebih baik. Tujuan akhir dari gerakan sosial menurut Di Renzo adalah tidak hanya terbatas pada perubahan sikap dan perilaku individu melainkan sebuah perubahan tatanan sosial baru yang lebih baik. Defenisi lain sebagaimana yang dikutip oleh Soeyono (p.4) berasal dari Baldrige (1989:299). Menurut Baldrige gerakan sosial merupakan sebuah bentuk perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi untuk mempromosikan atau sebaliknya menghalangi terjadinya perubahan. Organisasi gerakan itu harus mempunyai tujuan dan struktur organisasi yang jelas, serta

mempunyai suatu ideologi yang secara jelas berorientasi pada perubahan. Gerakan itu dilakukan secara sadar dan jelas mempromosikan kebijakan-kebijakan yang mereka inginkan, yang pada umumnya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas politik atau pendidikan.

Menurut *Giddens (1989)* berbeda dengan perilaku kolektif (Sunarto, 2000:203), gerakan sosial ditandai oleh adanya tujuan atau kepentingan bersama. Kepentingan itu dapat berupa mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok civil society dalam mendukung atau menentang perubahan sosial.

Gerakan Sosial Klasik / Lama

Akar konseptual dalam studi gerakan sosial dan tindakan kolektif sebagian terletak dalam tradisi psikologi sosial klasik.

Dalam tradisi klasik gambaran sosial tentang crowd adalah berupa kerumunan manusia secara kolektif yang terdiri dari sejumlah individu – individu dalam ruang yang terbatas yang merespon berbagai isu atau peristiwa dalam kepentingan umum. *Crowd* ini tidak seperti yang dikatakan oleh C.H. Cooley yaitu terdiri dari grup utama yang ‘berhadapan – hadapan’ melainkan lebih menyerupai kelompok yang saling merapat (berdesak – desakan).

Dalam karya – karya para psikolog klasik, *crowd* umumnya dibangun atas gambaran suatu kelompok yang berbahaya dengan sedikit atau tanpa organisasi, emosi yang mendidih dan kapasitasnya untuk menghilangkan akal sehat dan tanggungjawab.

Konsepsi masyarakat massa menyangkut gerakan sosial pada umumnya dirumuskan oleh sarjana seperti Lederer (1940), Arendt(1951), dan Kornhauser. Penekanan pada proses alienasi sosial, anomie, fragmentasi; pada meningkatnya perasaan tak berdaya, tak berakar, tak berwajah; dan pada meningkatnya birokratisasi dan mekanisasi hampir disemua aspek hidup adalah beberapa gambaran masyarakat kontemporer yang dilukiskan oleh sarjana teori-massa.

Gerakan Sosial Baru (New Social Movement) Merupakan bentuk lain dari Gerakan Sosial itu sendiri. Merujuk ke Pichardo dan Singh, ciri menonjol GSB yang dianggap

membedakannya dari gerakan sosial ‘lama’ atau tradisional, dapat diformulasikan sebagai berikut.

Ideologi dan Tujuan

Gerakan Sosia Baru (GSB) menanggalkan orientasi ideologis yang kuat melekat pada gerakan sosial lama, sebagaimana sering terungkap dalam ungkapan-ungkapan ‘anti-kapitalisme’, ‘revolusi kelas’, dan ‘perjuangan kelas’. GSB menepis semua asumsi Marxian bahwa semua perjuangan dan pengelompokan didasarkan atas konsep kelas.

Taktik dan Pengorganisasian.

Gerakan Sosial Baru umumnya tidak lagi mengikuti model pengorganisasian serikat buruh industri dan model politik kepartaian. GSB lebih memilih saluran di luar politik normal, menerapkan taktik yang mengganggu (disruptive), dan memobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar politik. Para aktivis GSB juga cenderung mempergunakan bentuk-bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan matang sebelumnya, lengkap dengan kostum dan representasi simboliknya.

Partisipan atau Aktor.

Partisipan Gerakan Sosial Baru (GSB) berasal dari berbagai basis sosial yang melintasi kategori-kategori sosial seperti gender, pendidikan, okupasi dan kelas. Mereka tidak terkotakkan pada penggolongan tertentu seperti kaum proletar, petani, dan buruh, sebagaimana aktor-aktor gerakan sosial lama yang biasanya melibatkan kaum marginal dan teralienasi. Para aktor GSB berjuang melintasi sekat-sekat sosialnya demi kepentingan kemanusiaan (Singh, 2001). Karena itu, aktor-aktor GSB juga berbeda dari gerakan sosial lama yang biasanya melibatkan kaum marginal dan teralienasi.

Medan atau Area

Medan atau area aksi-aksi GSB juga melintasi batas-batas region: dari aras lokal hingga internasional, sehingga mewujudkan menjadi gerakan transnasional. Karena itu pula strategi dan cara mobilisasi mereka pun bersifat global. Isu-isu yang menjadi kepedulian GSB melintasi sekat-sekat bangsa dan masyarakat, bahkan melintasi dunia manusia, menuju dunia alami. Dalam hal ini, GSB menampakkan wajah trans-manusia dengan mendukung kelestarian alam di mana manusia merupakan salah satu

bagiannya. Ini secara jelas terpantul dari gerakan-gerakan anti nuklir, ekologi, perdamaian, dan sebagainya, yang menghamparkan kebersamaan warga dari beragam nasionalitas, kebudayaan dan sistem politik (Singh, 2001). Dengan ciri-ciri tersebut di atas, GSB menampakkan wajah gerakan sosial yang plural.

Partisipasi Publik

Proses mewujudkan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah di Indonesia bukanlah hal yang mudah karena masyarakat belum terbiasa dengan partisipasi aktif dan sukarela. Upaya ini merupakan hal yang penting karena Indonesia merupakan negara yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi. Masyarakat masih terbiasa dengan *mobilized participation* yang dipergunakan secara ekstentik oleh baik rezim Orde Baru dan Orde Lama. Dalam era reformasi ini, mekanisme partisipasi publik dalam pemerintah daerah juga dapat dibidang masih lenah.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti

1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan keuangan
4. Pertahanan dan keamanan

Pemerintah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi

Di dalam mengkaji masalah

desentralisasi tidak bisa dilepaskan dengan masalah sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi didalam proses penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik, pada dasarnya berkenaan dengan "*delegation of authority and responsibility*" yang dapat diukur dari sejauh mana unit – unit bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab didalam proses pengambilan keputusan (Miewald dalam Widodo, 2001 : 38)

Sentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membrikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Diharapkan dari tipe ini, Peneliti bisa

mendapatkan gambaran jelas tentang sebuah kelompok gerakan yang terbentuk dalam usaha pemekaran Kabupaten Adonara – Nusa Tenggara Timur, serta mendapatkan gambaran (deskripsi) yang jelas tentang fenomena yang terjadi dalam lingkup sosial masyarakat Adonara, baik yang berdiam di daerah maupun diluar daerah.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode studi kasus dalam melihat Gerakan Sosial yang terjadi di Adonara. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu (*Bogdan dan Bikien - 1982*).

Peneliti mengangkat studi kasus mengenai Gerakan Sosial tentang Pemekaran Kabupaten Adonara – Nusa Tenggara Timur. Data yang dicari berupa model gerakan yang dilakukan, proses perjuangan yang dilakukan oleh gerakan tersebut dan perkembangan gerakan tersebut. Metode ini di gunakan karena peneliti ingin melakukan pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus, yaitu Gerakan Sosial di Adonara dalam proses pembentukan Kabupaten Adonara.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kabupaten Flores Timur – Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Adonara, dimana peneliti mencoba melihat Gerakan Sosial masyarakat daerah Adonara dalam rangka Pemekaran daerah Adonara menjadi Kabupaten baru. Peneliti memilih daerah Adonara terkait usaha pemekaran yang sedang dilakukan, dan sedang ramai diperbincangkan baik di kalangan masyarakat lokal, sampai pada kaum akademisi yang berasal dari Adonara. Selain alasan diatas, juga karena latar belakang penulis yang memang berasal dari Adonara.

Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mencari informasi yang dibutuhkan dari orang – orang yang terkait dalam proses Pemekaran Kabupaten Adonara. Orang – orang terkait yang dimaksud adalah pihak Pemerintah Daerah (Kecamatan), pihak pengurus Organisasi Pembentukan Kabupaten, dan masyarakat lokal Adonara.

Peneliti medapatkan sumber data dari Bapak Domi Rasa Wati, BA - Ketua Umum

Gerakan Pemekaran (Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara), dan dari Bapak Pius Pedang Melai, SM (Camat Ile Boleng), mewakili Pemerintah Daerah di Adonara.

Peneliti merasa data yang didapat telah tercukupi dari sumber informan yang telah ditemui.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan beberapa instrumen. Antara lain :

Teknik Wawancara ; Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara, kepada responden dan jawaban dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, dimana percakapan yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan pertanyaan – pertanyaan baru yang menyertainya merupakan bentuk pendalaman dari topik tersebut.

Observasi ; Disini observasi diartikan secara sempit, yaitu pengamatan dengan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan – pertanyaan. Peneliti akan turun langsung ke lapangan (Adonara) dan melakukan Observasi takpartisipan (*non participant observation*) ; Pengamat berada diluar subyek yang diamati, dan tidak ikut dalam kegiatan – kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian pengamat akan lebih mudah untuk mengamati kemunculan tingka laku yang diharapkan.

Studi Dokumentasi ; teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, dan dokumen lainnya.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer, dimana peneliti mendapatkan data secara langsung dari lapangan penelitian. Data primer di dapat lewat teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan, yaitu melalui wawancara dan observasi langsung. Peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari orang – orang yang memang terlibat langsung dalam proses pemekaran di Adonara.

Sedangkan data sekunder berupa jurnal, atau tulisan – tulisan, catatan dokumen atau

sumber informasi lain tentang proses Pemekaran Kabupaten Adonara, yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Proses ini adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikan kedalam suatu sistem dan satuan uraian dasar. Dengan kata lain, pada tahap ini data yang telah ada di atur, di urutkan, di kelompokkan, dan di tafsirkan sebelum membuat generalisasi.

Peneliti akan menganalisis data yang berupa data hasil transkrip wawancara, serta data berupa teks atau catatan – catatan baik dari data primer maupun sekunder, untuk kemudian dijadikan data siap saji yang dipergunakan hanya untuk kebutuhan penulisan skripsi.

PEMBAHASAN

Proses Awal Munculnya Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA)

Wacana Awal Pembentukan Adonara Menjadi Kabupaten Issue pemekaran kabupaten Adonara telah berlangsung sangat lama, tepatnya sekitar tahun 1960'an, tentunya sudah cukup lama untuk mempersiapkan sebuah daerah untuk menjadi sebuah kabupaten. Issue pemekaran Adonara menjadi kabupaten yang berkembang pada tahun 1960'an, yang perkembangannya lebih karena faktor kekesalan dari masyarakat Adonara, yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah di kabupaten. Masalah yang paling dirasakan pada waktu itu adalah persoalan transportasi yang sangat minim, baik transportasi antar desa dalam pulau maupun transportasi dari Adonara ke ibukota kabupaten nya yaitu Larantuka. Transportasi yang dibutuhkan untuk ke Larantuka adalah transportasi laut.

Mengutip teori dari *Neil Smelser* tentang *Structural condusiveness* dimana *Gerakan social dapat muncul karena terdapatnya kondisi struktural yang kondusif yang berupa ketidak harmonisan yang sedang berlangsung*, maka kemunculan awal issue Pemekaran Kabupaten Adonara, dimana masyarakat Adonara meneriakkan keinginan untuk melepaskan diri dari Kabupaten Flores Timur hanya berdasarkan pada kekesalan, serta latar belakang problem – problem social yang ada. Dimana terjadi kondisi ketidak harmonisan antara masyarakat Adonara dengan Pemerintah Flores Timur yang dianggap tidak memperhatikan kesusahan

rakyat Adonara.

Usaha pemekaran Adonara menjadi kabupaten memang berawal dari masyarakat, karena animo masyarakat yang begitu besar. Animo serta perjuangan masyarakat Adonara untuk segera menjadi Kabupaten ini kembali muncul dan memanas pada Tahun 2005, dimana masyarakat kembali mengangkat issue pemekaran Kabupaten Adonara.

Kemauan dari masyarakat ini kemudian ditangkap oleh kaum akademisi, yang kemudian ikut memperlancar, serta membangun semangat dari masyarakat awam (masyarakat yang tidak secara langsung terjun ke ranah politik), untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik. Masyarakat bukan saja ingin mengetahui hasilnya, tetapi juga ikut dalam setiap proses yang berlangsung. Kaum akademisi dapat dikatakan sebagai penuntun masyarakat desa sehingga semua masyarakat dapat memiliki pandangan jelas tentang hal – hal positif apa saja yang dapat diraih saat proses pemekaran ini terwujud. Dan bukan saja hanya berdasarkan pada kekecewaan semata sehingga merasa ingin melepaskan diri dari Kabupaten Flores Timur dan menjadi Kabupaten sendiri, tanpa tahu bahwa daerah Adonara memang memiliki potensi yang menjanjikan untuk bisa mengolah perkembangan dan kemajuan daerah nya sendiri.

Munculnya Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA) saat ini, Bapak. Domi Rasa Wati. B.A, beliau menuturkan proses awal munculnya panitia tersebut berawal pada tahun 2005 dengan nama gerakan Forum Persiapan Adonara Kabupaten (F – ParK).

“Awal munculnya tahun 2005, sebelumnya dengan nama Forum Persiapan Adonara Kabupaten (F – ParK), ketuanya pada waktu itu S.O Corebima (Alm.), itu 2005 sampai dengan 2009.”

“F – Park itu berdirinya 30 Desember 2005”

F – Park ini terbentuk atas inisiatif dari pemuda – pemuda Adonara yang berdomisili di Kabupaten Lembata. Dengan melihat kesuksesan Lembata menjadi Kabupaten pada tahun 1999, para pemuda Adonara di Lembata merasa “terpanggil” untuk bersatu dan memperjuangkan Adonara, tanah kelahiran

mereka menjadi kabupaten. Gagasan Putra Adonara yang berdomisili di Lembata ini kemudian disambut masyarakat Adonara dan membentuk Forum Perjuangan Kabupaten Adonara yang diberi nama Forum Persiapan Adonara Kabupaten pada tanggal 30 Desember 2005, yang diketuai Bapak. S.O. Corebima (Alm.).

Kemudian pada tanggal 22 Mei 2009 sesuai usul, saran dan arahan dari Departemen Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum Otonomi Daerah kepada Forum Persiapan Adonara Kabupaten cabang Kupang maka Pengurus Forum Persiapan Adonara Kabupaten (F-Park) sepakat merubah nama menjadi Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA) dan mengalihkan susunan pengurus Forum Persiapan Adonara Kabupaten (F-Park) menjadi pengurus Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA).

Visi dan Misi Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA)

•Visi

"Terwujudnya Kabupaten Adonara yang damai, sejahtera, adil dan makmur yang mampu mengurus Rumah Tangga nya sendiri dalam semangat budaya Lamaholot berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945".

•Misi

1. Membangun semangat kebersamaan dan gotong royong (Tite Hena) yang berasaskan Persatuan (Puing Taanro Mihna Gahang Taanro Kahana) Berasaskan Kesatuan (Taan One Tou Kirin Ehaan) Berasaskan Solidaritas (Taan Toin Liot Wekiket) Berasaskan Subsidiaritas (Taan Tulun Tali Wekiket) Berasaskan Toleransi (Taan Pete Dore Titen) Dan, berasaskan Netralitas (Tobun Tukan)
2. Membangun sumber daya manusia Adonara yang berkualitas (Atadikena), bertanggungjawab, kreatif, dan antisipatif terhadap perkembangan global.
3. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan membangun sentra-sentra ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Adonara.
4. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten yang kuat, bersih, dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perjuangan Panita Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA)

Perjuangan Panitia Pembentukan

Kabupaten Adonara tentulah tidak sendiri. Dukungan dari masyarakat Adonara juga sangat diperlukan, terlebih untuk menjaring dukungan dari masyarakat local Adonara untuk ikut serta memperjuangkan Pemekaran Kabupaten Adonara.

Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara juga memiliki program kerja untuk mensosialisasikan apa yang dituju dari usaha pemekaran tersebut, serta membuka pandangan dan pola pikir masyarakat Adonara tentang apa yang harus dikejar oleh Adonara pada masa sekarang. Adonara memiliki potensi untuk membesarkan serta membangun daerahnya sendiri, karena masyarakatnya mampu untuk itu, dan kondisi hasil komoditi yang cukup menjanjikan untuk diolah dan menjadi sumber pendapatan untuk membangun daerah.

Dalam wawancara yang telah dilakukan, Bapak Domi Rasa Wati juga mengatakan bahwa sebenarnya banyak hal positif yang bisa didapat dari hasil pemekaran nantinya, yang tentu saja masyarakat dapat lebih dekat dengan pemerintahnya, serta proses pelayanan yang lebih maksimal. Dengan adanya pemekaran, juga dapat membuka keterisolasian desa di Adonara ini, terutama Adonara bagian barat.

Kendala, Hambatan dan Tantangan Dalam Proses Perjuangan Pembentukan Kabupaten Adonara. Ada beberapa tantangan dan hambatan dalam proses perjuangan pembentukan Adonara menjadi Kabupaten, baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar ; Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pemekaran Daerah Otonom yang baru.

Adonara dikenal dengan masyarakatnya yang selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Bahkan dalam pidato sambutan dari Bapak Penjabat Bupati Flores Timur dalam Musyawarah Besar (MuBes) pada tanggal 22 September 2010, Beliau mengatakan dengan Pemekaran Adonara menjadi Kabupaten dapat memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk belajar guna dapat menjadikan generasi Adonara yang berkualitas, bukan lagi generasi yang selalu menggunakan parang dan tombak, namun dengan pena dan buku yang akan menjadikan generasi penerus yang dapat membangun Adonara.

Wawancara bersama Bapak. Domi Rasa Wati, BA (Ketua Umum Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara), menceritakan tentang

penelitian yang dilakukan oleh orang Jerman, dimana dia berkesimpulan bahwa Adonara merupakan “Pulau Pembunuh”, “The Murder Island”. Ini didasarkan pada sengketa yang terjadi di Pulau Adonara yang sering berakhir dengan perkelahian dan bahkan pertumpahan darah.

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat Adonara Barat adalah :

- Pembentukan Dermaga laut. Wilayah Adonara Barat direncanakan untuk menjadi Kota Pelabuhan, karena kondisi wilayahnya yang terbuka untuk transportasi laut, seperti ke Ujung Pandang dan ke Surabaya. Dengan dijadikan Kota Pelabuhan maka Adonara Barat akan menjadi daerah pergudangan hasil bumi.

- Masyarakat Adonara Barat juga diberikan sosialisasi mengenai transportasi darat yang nantinya akan lebih muda dan dapat menghemat waktu, jika pembangunan jalan raya telah dibenahi. Karena kondisi jalan yang masih rusak dan tidak terawat, maka saat ini masyarakat masih merasakan susahnya mengakses Kota Waiwerang. Dan semua itu akan berubah dengan perbaikan jalan yang akan dilakukan jika Adonara menjadi Kabupaten. Karena salah satu tujuan yang menjadi prioritas adalah proses perhubungan yang harus lancar, baik laut maupun darat.

Pandangan Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA) Terhadap Potensi Daerah Adonara

Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA) berpandangan positif terhadap potensi Daerah Adonara, jika nantinya menjadi Kabupaten. Menurut Bapak Domi Rasa Wati selaku Ketua Panitia, merasa bahwa Adonara memiliki potensi yang cukup menjanjikan, baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun dari segi Sumber Daya Alamnya.

Roda perputaran ekonomi sudah dapat dibayangkan, serta dengan terwujudnya Adonara menjadi Kabupaten, dapat menarik investor agar bisa masuk, tanpa harus menunggu.

KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mengaktifkan sistem Pemerintahan yang ada telah melahirkan sistem Otonomi Daerah. Otonomi Daerah dimaksudkan untuk mengasah potensi yang dimiliki masing – masing daerah agar dapat

mengolah dan mengembangkan daerahnya masing – masing secara mandiri. Dalam perjalanannya, Otonomi Daerah tidak terlepas dari berbagai Gerakan Sosial yang muncul, khususnya Gerakan Sosial masyarakat daerah. Gerakan Sosial yang muncul di Adonara – Nusa Tenggara Timur juga bermaksud untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Adonara, sebagai upaya dari Pemekaran Kabupaten Flores Timur.

Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA) merupakan gerakan yang muncul di Adonara, sebagai kepedulian putra Adonara untuk memajukan daerahnya. Dan jalan Pemekaran dilihat sebagai kesempatan yang bagus untuk prospek Adonara kedepannya.

Dibalik itu, Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA) bertujuan untuk menjadi Lembaga Mitra Pemerintah Kabupaten Adonara, jika nanti Adonara telah benar – benar menjadi Kabupaten. Panitia Pembentukan Kabupaten Adonara (PPKA) akan menjadi badan pengawas jalannya Pemerintahan di Adonara, serta terus memberikan kontribusi dalam membangun Adonara yang lebih baik. Karena lewat Pemekaran masyarakat mengharapkan adanya realisasi dari tujuan awal adanya Otonomi Daerah, yaitu sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Saran

Penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan pembandingan terhadap Gerakan Sosial yang dilakukan di daerah – daerah, khususnya daerah Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai Otonomi Daerah, perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam juga terhadap perkembangan serta alasan berkembangnya Otonomi Daerah di Indonesia. Karena kurangnya pembahasan mendetail tentang Otonomi Daerah pada tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Singh, Rajendra, 2010, Gerakan Sosial Baru, Penerbit Resist Book, Yogyakarta
- Tribowo, Darmawan, 2006, Gerakan Sosial : Wahana *Civil Society* bagi Demokratisasi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

- Putra, Fadillah., Heri Setiono., Sutomo., dan Saiful Arif, 2006, *Gerakan Sosial : Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, Averroes Press, Malang
- Karim, Abdul Gaffar, 2006, *Kompleksita Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Widjaja, HAW, 2001, *Titik Berat Otonomi : Pada Daerah Tingkat II, Rajawali Pers*, Jakarta
- Muluk, M.R. Khairul, 2009, *Peta Konsep : Desentralisasi & Pemerintah Daerah*, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya
- Soehartono, Irawan, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
- Otonomi Daerah di Indonesia [artikel on-line], Diunduh pada 15 Desember 2010 < diambil dari <http://www.wikipedia.org>; Internet >
- Definisi_Pengertian Sentralisasi dan Desentralisasi [artikel on-line], Diunduh pada 4 November 2010 < diambil dari <http://www.Organisasi.org>; Internet >
- Teori Desentralisasi [artikel on-line], Diunduh pada 24 November 2010 < diambil dari <http://www.Lalilintarblog.blogspot.com>; Internet >
- Otonomi Daerah [artikel on-line], Diunduh pada 28 Mei 2011 < diambil dari http://eprints.undip.ac.id/1046/1/OTONOMI_DAERAH.pdf; Internet >
- Latar belakang Otonomi Daerah [artikel on-line], Diunduh pada 28 Mei 2011 < diambil dari <http://iwan09file.wordpress.com>; Internet >
- Proses Otonomi Daerah [artikel on-line], Diunduh pada 30 Mei 2011 < diambil dari <http://dhanielalu.blog.com>; Internet >
- Gerakan Sosial dan Otonomi Daerah [artikel on-line], Diunduh pada 26 Mei 2011 < diambil dari <http://www.solidaritasburuh.org>; Internet >
- Blog putra – putri Lembata [artikel on-line], Diunduh pada 28 Mei 2011 < diambil dari <http://lembataku.wordpress.com>; Internet >
- Gerakan Masyarakat Adat [artikel on-line], Diunduh pada 26 Mei 2011 < diambil dari <http://www.aman.or.id/in/masyarakat-adat>; Internet >
- Praktek Kehidupan di Adonara [artikel on-line], Diunduh pada 27 Mei 2011 < diambil dari <http://abnersanga.wordpress.com/adonara>; Internet >
- Wikipedia [artikel on-line], Diunduh pada 19 Mei 2011 < diambil dari <http://id.wikipedia.org>; Internet >
- Pemekaran Kota Maumere [artikel on-line], Diunduh pada 12 Mei 2011 < diambil dari <http://floresfile.blogspot.com/2011/05/pemekaran-kota-maumere>; Internet >
- Dukungan Pemerintah Terhadap Daerah Otonomi [artikel on-line], Diunduh pada 16 Mei 2011 < diambil dari <http://www.floresnews.com>; Internet >